

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infrastruktur merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatnya perekonomian suatu Negara maupun Kota. Apabila Infrastruktur Jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kecamatan Kotawaringin Lama baik, maka akan maju suatu perekonomian sebuah Kota, namun apabila Infrastruktur ini tidak baik, maka perekonomian pun akan berdampak pula tidak baik. Tersedianya akses transportasi yang layak dan baik sangat berperan untuk lancarnya arus lalu lintas. Meningkatnya perkembangan lalu lintas akibat pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan permasalahan yang signifikan jika tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas dari Infrastruktur jalan yang tersedia. Pertumbuhan transportasi yang sangat pesat berpengaruh pada padatnya lalu lintas, sehingga diperlukan adanya perbaikan jalan yang menunjang pada tingkat kualitas yang baik dan berstandar.

Infrastruktur jalan juga mempunyai fungsi yang begitu penting dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi rakyat dalam memenuhi kebutuhan primer atau sekunder, baik untuk penyaluran barang maupun jasa. Adanya akses jalan yang bagus sangat berperan terhadap kemudahan dalam berlalu lintas. Membahas tentang pembangunan Infrastruktur, memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya untuk membuka batas-batas wilayah, memudahkan jalur dibidang ekonomi,

sosial budaya namun untuk meningkatkan kemudahan menyelesaikan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan pelayanan umum. Karena pembangunan Infrastruktur belum dilaksanakan secara penuh, maka usaha pertumbuhan kemakmuran masyarakat di suatu Daerah belum dapat terpenuhi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur mendefinisikan Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Hal ini bergantung pula pada suatu Kota yang dimana pihak Pemerintah atau yang bersangkutan terhadap Infrastruktur ini peduli akan pentingnya Infrastruktur tersebut untuk kemajuan Kota. Karena pada dasarnya suatu Daerah maju dalam bidang ekonomi, sosial, budaya merupakan faktor dari tersedianya Infrastruktur jalan yang memadai. Apabila Infrastruktur dari Daerah tersebut sangat unggul, maka Daerah semakin maju dan berkembang.

Menurut Kodoatie (2005), Infrastruktur sebagai pendongkrak utama sektor sosial dan sektor ekonomi dilakukan dalam suatu hal keselarasan dan menyeluruh. Infrastruktur yang menjadi sarana yang dapat mengembangkan kegunaan Pemerintah dalam hal melayani masyarakat ini tidak dapat berjalan apabila terpisah. Keselarasan itu menentukan hasil keseluruhan pelayanan Infrastruktur tersebut. Infrastruktur ini juga akan berkembang pesat apabila dari

Pemerintah sendiri dapat melaksanakan kegiatan pembangunan Infrastruktur dengan serius. Karena dampak dari pembangunan ini akan dirasakan oleh publik.

Pembangunan suatu Infrastruktur di daerah tak lepas dari peran Pemerintah dan Instansi terkait yang mengelola pembangunan Infrastruktur tersebut dari proses perancangan sampai ke proses pembangunan selesai. Tentu saja Pemerintah maupun Instansi yang mengelola pembangunan Infrastruktur ini terdapat kinerja yang menjadi acuan berhasil atau tidaknya pembangunan infrastruktur tersebut. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah tumpuan perubahan dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah, masyarakat menganggap belum berhasil memberi hasil yang besar dalam menumbuhkan kinerja birokrasi. Keadaan seperti ini seharusnya dapat menjadi evaluasi bagi Pemerintah maupun Instansi dalam meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi.

Tetapi permasalahan tersebut bertolak belakang dengan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat. Dimana di Kabupaten ini terdapat suatu permasalahan Infrastruktur Jalan yang menghubungkan antara Pusat Kota Kabupaten Kotawaringin Barat dengan salah satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Kotawaringin Lama yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut. Padahal akses jalan tersebut begitu sangat penting bagi Masyarakat Kotawaringin Barat untuk menuju ke Kecamatan bahkan juga untuk menuju ke Kabupaten lainnya

dan juga sangat penting sebagai jalur perekonomian Kabupaten agar lebih meningkat.

Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan mendefinisikan jalan ialah sebagai bagian sarana dan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini sangat dirugikan oleh masyarakat yang menggunakan jalan antara Kabupaten menuju ke Kecamatan tersebut, karena jalan yang di harapkan dari warga Kecamatan Kotawaringin Lama sebagai akses menuju ke pusat Kota Kabupaten Kotawaringin Barat ini tidak kunjung selesai pembangunannya sejak dimulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2017. Jalan ini sempat selesai dan sempat juga dilalui oleh warga Kabupaten Kotawaringin Barat maupun warga Kecamatan Kotawaringin Lama. Namun hanya beberapa tahun saja, karena apabila saat hujan turun, jalan ini akan mengalami becek yang luar biasa dan dapat tergenang air luapan dari rawa dengan kedalaman 60cm atau di batas lutut kaki orang dewasa. Banyak warga yang merasa dirugikan dengan tidak kunjung selesainya proyek pembangunan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan menuju ke pusat kota Kabupaten. Faktor ini yang membuat jalan tidak dapat di akses oleh kendaraan apapun.

Apabila dipaksakan, kendaraan-kendaraan yang melalui jalan ini akan mengalami kerusakan pada mesin dan bahkan dapat terperosok ke dalam kubangan tanah yang menjadi lumpur.

Tentu saja dengan perbaikan Infrastruktur jalan yang tidak kunjung selesai tersebut sangat merugikan masyarakat yang menggunakan jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kecamatan Kotawaringin Lama. Apalagi bagi masyarakat yang memang benar-benar menjadikan jalan tersebut sebagai jalur utama mereka mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Karena jalan ini adalah jalur penghubung antara Kabupaten Kota ke Kecamatan, kemudian penghubung ke Kabupaten tetangga dan bahkan sebagai penghubung ke Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Ririn Nirmalasari sebagai pengguna jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kecamatan Kotawaringin Lama dan sebagai salah satu Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bidang kesehatan di Kecamatan Kotawaringin Lama mengaku sangat di rugikan dalam pembangunan Infrastruktur jalan yang tidak kunjung selesai ini. Hal yang di rugikan dari bidang kesehatan, apabila saat jalan banjir dan berlumpur, untuk merujuk pasien dari puskesmas Kecamatan Kotawaringin Lama menuju Rumah Sakit di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi sulit. Karena harus melalui Kabupaten Lamandau yang jaraknya relatif lebih jauh untuk menuju ke Kabupaten Kotawaringin Barat, dan sangat beresiko untuk keselamatan pasien yang dirujuk tersebut. Kemudian apabila musim kemarau tiba, jalan penghubung dari Kabupaten Kotawaringin Barat

menuju Kecamatan Kotawaringin Lama yang belum beraspal ini menjadi berdebu dan menimbulkan penyakit ispa. Namun untuk bidang perekonomian, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari menjadi sangat sulit dan mahal karena apabila jalan tersebut banjir kemudian berlumpur, warga harus mengirim bahan pokok sehari-hari itu dengan menggunakan speedboat melalui jalur sungai yang mana dampaknya harga bahan pokok menjadi naik (Wawancara tanggal 20 September 2017 Pukul 16.15 WIB).

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Kotawaringin Lama yang menggunakan jalan tersebut mengharap pihak yang memang mengurus pembangunan jalan ini dapat secepatnya di selesaikan agar masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut. Pembangunan Infrastruktur ini juga berhubungan dengan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang menangani di bidang infrastruktur dan relasi antara Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Dimana peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sangat penting dalam pembangunan Infrastruktur untuk mensejahterakan warga yang menggunakan Infrastruktur ini dan penting bagi peningkatan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri. Dan apabila sudah tersambung maka banyak sekali efek positifnya terhadap masyarakat utamanya masyarakat Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam) akan lebih maju pesat. Rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menjadikan Kecamatan Kotawaringin

Lama sebagai Kecamatan tertua di Kabupaten Kotawaringin Barat akan terwujud dengan tujuan wisata religinya (Ujang Iskandar, 2014).

Menurut Sigit Dzakwan (2017), terhambatnya Pembangunan Infrastruktur ini adalah minimnya anggaran untuk perbaikan jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan ketika hujan turun, jalan ini sangat becek dan menghambat kerja proyek pembangunan tersebut. Jelas untuk masalah minimnya anggaran ini termasuk permasalahan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat. Karena pada dasarnya dalam pembangunan infrastruktur jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kecamatan Kotawaringin Lama ini yang menjadi penanggung jawab proyek pembangunan adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tersebut.

Namun sebaliknya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri belum mencapai tujuan organisasi tersebut yang bersangkutan dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri yang mana Infrastruktur tersebut tidak kunjung usai sampai saat ini. Bahkan H.Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah menanggapi dengan serius, menekankan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mundur dari jabatannya jika tidak dapat menyelesaikan pembangunan jalan Trans Kotawaringin Barat-Kotawaringin Lama tersebut. Pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah melakukan upaya untuk mempercepat

pembangunan tersebut dengan menaikkan status jalan ke Provinsi (Maman W, 2017).

Bahkan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat juga berharap status jalan tersebut meningkat menjadi jalan Provinsi. Pengajuan peningkatan status jalan Kabupaten Kotawaringin Barat-Kecamatan Kotawaringin Lama ini bertujuan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ikut membantu perbaikan jalan. Sebab, jika status jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama beralih menjadi Jalan Provinsi, maka kewenangan perbaikan jalan tersebut juga berada di Pemerintah Provinsi Kalteng. Selain untuk menambah anggaran perbaikan jalan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat menilai peningkatan status jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama mendesak untuk dilakukan karena jalan tersebut juga menjadi jalan penghubung antara Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kabupaten Sukamara (Hidayat, 2017).

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mencari permasalahan tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembangunan Infrastruktur khususnya Infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan selain untuk penilaian terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, juga bertujuan sebagai evaluasi terhadap organisasi publik lainnya untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis ingin melaksanakan penelitian yang berjudul **“Kinerja Dinas Pekerjaan Umum**

peningkatan tersebut dengan menaikkan status jalan ke Provinsi (Mansur W.

2017).

Salah satu pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat juga berharap status jalan tersebut meningkat menjadi jalan Provinsi. Peningkatan peningkatkan status jalan Kabupaten Kotawaringin Barat-Kotawaringin Lama ini bertujuan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ikut membantu perbaikan jalan. Sebab, jika status jalan Pangkajenean Baru-Kotawaringin Lama berubah menjadi Jalan Provinsi, maka kewenangan perbaikan jalan tersebut juga berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan. Selain untuk menambah anggaran perbaikan jalan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat menilai peningkatan status jalan Pangkajenean Baru-Kotawaringin Lama mendesak untuk dilakukan karena jalan tersebut juga menjadi jalan penghubung antara Kabupaten

Kotawaringin Barat menuju Kabupaten Sukamara (Hidayat, 2017).

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mencari permasalahan tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan selain untuk penelitian terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, juga bertujuan sebagai evaluasi terhadap organisasi publik lainnya untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis ingin melaksanakan penelitian yang berjudul "Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah Tahun 2016 ”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kecamatan Kotawaringin Lama Pada Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pembangunan Jalan antar Kecamatan Di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut.
2. Manfaat dari penulisan ini :
 - a. Secara teoritik bisa bermanfaat untuk menambah kajian pengetahuan tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pembangunan Infrastruktur.
 - b. Secara praktis, dapat dijadikan acuan ataupun cara bagaimana kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan sesuai dengan

D. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur

Identitas Peneliti	Temuan	Rekomendasi
<p>Rozi, Bahru and Nugroho, Kandung Sapto and Jumiati, Ipah Ema (2016)</p> <p>tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Proyek Pembangunan Jalan Di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Provinsi Banten</p>	<p>1. relitasnya ternyata dapat dikatakan belum berhasil, karena masih terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga, kurang transparansinya terkait anggaran, dan lemahnya supremasi hukum.</p> <p>2. kurang berkualitasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga, anggaran yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan dinas, masih kurangnya tingkat kesadaran terhadap pelanggaran, dan lemahnya supremasi hukum.</p>	<p>Agar good governance bisa diterapkan dengan efektif dan efisien maka perlu meningkatkan pengawasan pada proses dan pelaksanaan pembangunan, membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas SDM pegawai yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak.</p>
<p>Faisal Nur, Sitti Bulkis dan Hamka Naping (2011)</p> <p>Tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa”</p>	<p>Tingkat pendidikan hanya berhubungan dengan partisipasi masyarakat pada tahap persiapan sedangkan homogenitas masyarakat tidak mempunyai hubungan terhadap partisipasi masyarakat.</p>	<p>Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap persiapan berupa kehadiran dan sumbangan ide atau pemikiran, pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, dana dan material, pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga.</p>

Identitas Peneliti	Temuan	Rekomendasi
<p>Juni Dwi Astono (2013)</p> <p>Tentang</p> <p>“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Melalui Disiplin Kerja Karyawan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah”</p>	<p>Dalam kegiatan sehari-harinya pemimpin sering menghadapi suatu masalah, hendaknya selalu bersikap arif dan bijaksana, ada saat-saat sulit Dalam pengambilan keputusan, pemimpin agar melibatkan bawahan (para pejabat eselon III), dari para bawahan akan mendapat masukan yang bisa dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.</p>	<p>Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Melalui Disiplin Kerja Karyawan Dinas sangat berpengaruh secara signifikan dan positif untuk kinerja Pimpinan dan Karyawan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah agar menjadi lebih efektif dan lebih baik.</p>
<p>Adianto Mesak (2013)</p> <p>Tentang “ Analisis Kinerja Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Dengan Pendekatan Balance Scorecard ”</p>	<p>Secara keseluruhan kinerja akhir pada Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Nunukan adalah sebesar 62,43%, atau masuk pada kategori skala cukup baik hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai kinerja akhir pada perspektif pelanggan yaitu sebesar 57,65 % atau masuk pada kategori cukup baik.</p>	<p>Dalam hal menata pelayanan administrasi agar tidak berbelit-belit, menjaga ketepatan waktu pelayanan dengan baik, meningkatkan tampilan fisik kantor untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Bidang Bina Marga harus memberikan pemahaman tentang visi, misi dan strategi organisasi kepada semua pegawai.</p>
<p>Yohanes F.C. Ransun, Freddie Kalangie, Yurnie Sendow (2017)</p> <p>Tentang “Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah”</p>	<p>Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado masih tergolong asal – asalan dan tidak sepenuhnya berhasil. Itu dikarenakan masyarakat menilai hasil kerja yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat</p>	<p>Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado harus lebih baik dan serius, melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada, agar masyarakat merasa puas dan dan terlayani dengan knera Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado.</p>

Identitas Peneliti	Temuan	Rekomendasi
<p>Azhari, Teuku Budi Aulia, Ibnu Abbas Majid (2014) tentang</p> <p>“ Faktor – Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kinerja Kontraktor Pada Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Di Kabupaten Aceh Jaya “</p>	<p>Masalah pembebasan lahan; data desain tidak lengkap; gangguan keamanan; keterlambatan pengiriman material; terhambatnya keuangan pihak kontraktor; keterlambatan pembayaran oleh pemilik; kurangnya kedisiplinan tenaga kerja dan tenaga ahli; akses ke lokasi proyek; cuaca dan terakhir kurangnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan tenaga ahli.</p>	<p>Kontraktor seharusnya dapat mempersiapkan segala prosedur sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur agar tidak adanya kendala atau kekurangan dalam melaksanakan peroyek tersebut.</p>
<p>Watik Astunik (2015)</p> <p>Tentang</p> <p>“Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan</p>	<p>Dalam segi input masih ada kendala pada kekurangan dana, sarana dan prasarana dan pegawai.</p>	<p>Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan Dinas Pekerjaan umum kabupaten Tulang Bawang Barat harus responsif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, lebih mengupayakan dalam penganggaran dana setiap tahunnya, dan dapat memenuhi segala kebutuhan sarana dan prasarana yang di inginkan.</p>

Rekomendasi	Temuan	Identitas Penelitian
<p>Kontraktor seharusnya dapat mempersiapkan segala prosedur sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur agar tidak adanya kendala atau kekurangan dalam melaksanakan proyek tersebut.</p>	<p>Masalah pembebasan lahan; data desain tidak lengkap; gangguan keamanan; keterlambatan pekerjaan; material; keterlambatan keuangan pihak kontraktor; keterlambatan pembayaran oleh pemilik; kurangnya kedisiplinan tenaga kerja dan tenaga ahli; akses ke lokasi proyek; cuaca dan terakumulasi kurangnya koordinasi dan keahlian tenaga kerja dan tenaga ahli.</p>	<p>Asri, Fakhri Budi Aulia. (2014). <i>Analisis Masalah</i> (2014) Bandung. Faktor - Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kinerja Kontraktor Pada Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Di Kabupaten Aceh Jaya</p>
<p>Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat harus responsif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, lebih mengutamakan dalam penanganan dan setiap tahunnya dan dapat memenuhi segala kebutuhan sarana dan prasarana yang di inginkan.</p>	<p>Dalam segi input masih ada kendala pada kekurangan dana, sarana dan prasarana dan pegawai.</p>	<p>Wahid Asmuk (2012). Tulang Bawang. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan</p>

Identitas Peneliti	Temuan	Rekomendasi
<p>Nindra Sandria Ardana</p> <p>(2014) Tentang “Efektivitas Pasal 13 JO Pasal 14 Huruf (D) Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya Terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Surabaya”</p>	<p>Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian warga masyarakat terhadap kegiatan pembangunan jalan, yaitu warga yang tanahnya terkena pembebasan lahan untuk rencana pembangunan. Warga tersebut banyak yang tidak sepakat dengan adanya kegiatan pembangunan jalan ini dikarenakan ketidakcocokan harga ganti rugi tanah yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga pembangunan jalan menjadi lambat..</p>	<p>Pemerintah Kota Surabaya seharusnya dapat bersosialisasi kepada masyarakat akan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan, dan Pemerintah Surabaya harus bernegosiasi kepada masyarakat tentang ganti rugi kepada masyarakat agar antara masyarakat dan pemerintah tidak ada yang merasa dirugikan.</p>
<p>Imam Musaddad (2016) tentang “Produktivitas Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Pada Tahun 2015)”</p>	<p>Jika mendapat kategori buruk akan berdampak pada keberlangsungan rencana kerja dan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai DPU, dan berdasarkan hasil penelitian didalam DPU tidak terdapat masalah yang menghambat kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya.</p>	<p>Produktivitas ASN di DPU Bantul dinjau dari efektivitasnya Secara statistic bahwa nilai rata-rata unsur efektivitas memang berada pada interval 2,51s/d 3,25 dan berkategorikan B dengan kata lain baik. Dan efisiensi juga cukup baik . Dan secarastatistic bahwa nilai rata-rata efisiensi memang berada pada interval 2,51 s/d 3,25 dikategorikan B dengan kata lain baik. Sedangkan factor-faktor yang terdiri dari pengetahuan, keahlian, kemampuan, sikap, dan perilaku semuanya dikatakan baik.</p>

Identitas Peneliti	Temuan	Rekomendasi
Christin Dessy Sahudege, Burhanudin Kiyai, Alden Laloma (2015), tentang “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat”	Masih ada pelayanan kepada masyarakat yang belum direspon, dan yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan perekonomian di Kabupaten Sorong khususnya adalah keterbatasan Anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.	Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan perekonomian di Kabupaten Sorong sudah berjalan dengan sangat baik, dan mengalami banyak peningkatan pada pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan perekonomian masyarakat dengan pembangunan pasar-pasar serbaguna dan pasar-pasar permanen sehingga mendapat kemajuan yang cukup baik dalam memprioritaskan perekonomian masyarakat lokal

Sumber : Hasil kajian peneliti dari berbagai jurnal

Melihat dari tabel di atas, review dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu dalam melaksanakan kinerjanya, Dinas Pekerjaan Umum sudah melakukan usaha dalam pembangunan infrastruktur jalan dengan semaksimal mungkin untuk mensejahterakan kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan sektor ekonomi serta meningkatkan sektor sosial budaya suatu daerah. Namun, di balik persamaan tersebut, memiliki perbedaan pendapat antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Perbedaan itu adalah bahwa hal yang menghambat pembangunan infrastruktur ini beragam masalah yang setiap daerah memiliki permasalahan masing-masing. Adapun perbedaan masing-masing Dinas Pekerjaan umum dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan program yaitu berdasarkan tingkat pendidikan pegawai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

sumber daya manusia dalam Dinas Pekerjaan Umum, produktivitas kinerja, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja di artikan menurut Pasolong (2010:175) konsep kinerja terbagi menjadi dua bagian, kinerja perseorangan dan kinerja organisasi. Kinerja perseorangan adalah hasil kegiatan individu perseorangan tersebut dalam berorganisasi. Sedangkan kinerja organisasi merupakan hasil kegiatan yang dicapai oleh suatu organisasi. Antara kinerja perseorangan dan kinerja organisasi sangat berhubungan erat. Di karenakan berhasilnya pencapaian kinerja suatu organisasi tergantung oleh kinerja pegawai perseorangan tersebut dalam mencapai kinerjanya.

Sedangkan menurut Mahsun (2006:25) Kinerja merupakan suatu uraian untuk meningkatkan program atau kegiatan dalam pencapaian yang di lakukan oleh organisasi dalam memenuhi sasaran, visi, misi, yang telah tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja juga dapat di artikan sebagai hasil kerja dari suatu organisasi maupun kerja perseorangan yang mencapai keberhasilan. Keberhasilan kinerja suatu organisasi maupun kinerja perseorangan individu tidak akan berhasil apabila tidak memiliki target capaian atau tujuan

Byars (1984) berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil dari usaha seseorang yang telah tercapai dengan kemampuan yang di miliki dalam situasi tertentu. Sedangkan menurut Robbins (2001) kinerja merupakan hasil yang di selesaikan oleh seorang pegawai dalam suatu pekerjaan tertentu. Hasil yang di maksud merupakan sejauh mana seorang pegawai dalam menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan yang telah di berikan sesuai dengan aturan dan tujuan dari kerja pegawai tersebut. Prawirosento dalam Sinambela (2012:5) juga berpendapat, kinerja merupakan nilai kerja yang dapat diraih oleh perseorangan atau kelompok orang dalam suatu organisasi, harus sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, untuk usaha dalam meraih tujuan dalam berorganisasi harus disetujui, dan tidak melanggar hukum. Tetapi menurut Bernard, John H dan Joyce E.A Russel (1993) Kinerja di artikan sebagai catatan dari hasil suatu kegiatan tertentu yang dapat menilai baik atau buruk kerja dari seseorang atau kelompok.

Pendapat lain juga keluar dari Bambang Guritno dan Waridin (2005), menurut mereka kinerja adalah membandingkan hasil kerja pegawai yang telah tercapai dengan kapasitas yang telah di tetapkan. Namun dalam pendapat Hakim (2006) menjelaskan kinerja merupakan pencapaian kerja yang telah di raih oleh perseorangan yang selaras dengan kegunaan atau kewajiban perseorangan tersebut dalam suatu organisasi atau kantor pada waktu yang telah di tentukan.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa kinerja adalah hasil pencapaian kerja yang di dukung oleh sumber daya individu atau suatu organisasi

untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan cara membandingkan hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh seorang pegawai.

b. Kinerja Organisasi Publik

Mahsun (2006:1) berpendapat bahwa organisasi diartikan sebagai sekumpulan orang yang bekerja sama dalam memenuhi pencapaian tujuan atau sasaran yang telah disepakati bersama dengan cara yang terstruktur. Sedangkan menurut Sinambela (2012:182) organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berkaitan dengan kepentingan umum dan menyediakan kebutuhan barang dan jasa masyarakat. Yang mana dalam menyediakan barang dan jasa ini akan dibayar melalui pajak, retribusi, dan pendapatan negara yang telah diatur dalam Undang-Undang. Organisasi sektor publik sangat berkaitan dengan pemerintah. Namun sesungguhnya sektor organisasi lebih luas dari pemerintah dalam memenuhi penyediaan barang dan jasa untuk publik.

Prawirosentono (1999) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kerja suatu organisasi akan mendukung kinerja organisasi tersebut dengan baik dan mudah dicapai. Sedangkan menurut Perry (1989) Kinerja organisasi mengarah kepada kemampuan organisasi tersebut dalam mencapai suatu hasil yang baik dan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Hasil inilah yang akan menjadi patokan kinerja dari suatu organisasi tersebut. Penilaian ini yang menentukan baik dan buruknya suatu organisasi dalam menyelesaikan tugas yang telah diamanatkan kepada pihak organisasi tersebut.

Atmosudirdjo dalam Pasolong (2010:176) memiliki pendapat bahwa kinerja organisasi merupakan sebagai kemampuan suatu organisasi secara rata dalam memenuhi keperluan yang telah di absahkan dari organisasi yang mengenai dalam meningkatkan efektivitas organisasi secara berlanjut untuk tercapainya kebutuhan secara kompeten. Sedangkan menurut Hodge, Anthony dan Gales (1996) berpendapat bahwa kinerja organisasi merupakan suatu kegiatan organisasi yang memiliki tujuan atau keuntungan dalam mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan dari organisasi tersebut. Namun Pasolong (2010:175) menjelaskan bahwa kinerja organisasi adalah keseluruhan hasil dari kerja atau kegiatan yang dapat tercapai oleh suatu organisasi tersebut. Ada beberapa elemen yang di miliki oleh kinerja organisasi yaitu :

a. Hasil aktifitas yang diraih secara perseorangan atau secara lembaga, yang merupakan kinerja yang di lakukan adalah total akhir yang di dapat secara perseorangan atau perkelompok.

b. Dalam menjalankan tugas, individu atau institusi diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang merupakan individu atau institusi ini di beri hak dan kekuasaan untuk mengerjakan tugas dengan harapan pekerjaan tersebut dapat selesai secara baik.

c. tugas yang di kerjakan oleh suatu organisasi harus sesuai peraturan yang

- d. Pekerjaan yang di kerjakan suatu organisasi tidak bertolak belakang dengan moral dan etika, artinya pihak organisasi tidak melanggar aturan maupun moral dan etika yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bawa kinerja organisasi publik merupakan hasil kerja suatu organisasi publik dalam mencapai target atau sasaran untuk melayani atau menyediakan barang dan jasa kepada publik dalam memenuhi kebutuhan dan melakukan segala kegiatan mengenai tugas dan fungsi, organisasi harus bekerja sesuai dengan aturan maupun moral dan etika.

c. Pengukuran Kinerja

Robertson dalam Mahsun (2006:25) berpendapat bahwa pengukuran kinerja adalah suatu cara penilaian kemajuan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan dan target yang sebelumnya sudah di tetapkan, termasuk penjelasan atas ketetapan dalam menggunakan sumber daya yang menciptakan barang dan jasa, yang mana barang dan jasa ini berkualitas baik dan dapat membuat pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang di berikan, dan hasil aktifitas ini disatukan dengan tujuan yang diharapkan dan kemampuan dalam mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Mahsun (2006:53) pengukuran kinerja merupakan suatu cara yang dipakai untuk mengetahui dan menilai kegiatan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan tujuan, sasaran, serta strategi untuk mengetahui tingkatan kemampuan serta tanggung jawab dari organisasi tersebut

dalam mengambil suatu kebijakan. Elemen pokok dalam suatu pengukuran kinerja yaitu :

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
- b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
- c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
- d. Evaluasi Kinerja

Menurut (Cahyono, 2000) pengukuran kinerja adalah salah satu unsur yang penting dalam suatu organisasi. Pengukuran kinerja tersebut dapat digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya kegiatan organisasi dan dapat digunakan untuk dasar menyusun formasi organisasi. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, “pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan antara kerja yang seharusnya terjadi dengan kerja yang diharapkan.

Intanghina (2008:6) berpendapat bahwa pengukuran kerja merupakan suatu cara untuk meningkatkan dalam hal mengambil suatu keputusan maupun kemampuan. Dan kinerja juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu sasaran maupun tujuan. Whittaker dan Simons (2000) dalam intanghina (2008:7) menjelaskan pengukuran kinerja adalah cara untuk menilai dan membandingkan kemajuan suatu kinerja yang telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah di

tetapkan. Namun pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai alat untuk menentukan siapa yang mendapat penghargaan atau hukuman, tetapi pengukuran kinerja di gunakan sebagai alat komunikasi dan manajemen dalam membentuk sebuah kinerja organisasi atau pegawai menjadi lebih baik lagi.

Pasolong (2010:182) juga berpendapat bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kerja, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan yang baik. Pengukuran kinerja merangkap dalam penetapan untuk mencapai indikator suatu kinerja. Adapun tujuan dari pengukuran kinerja yang dijelaskan oleh Mardiasmo dalam Pasolong (2010:185) yaitu :

- a. Membantu dalam urusan kegiatan pemerintahan agar fokus terhadap tujuan dan sasaran program bagian kerja.
- b. Menentukan sumber daya dan menentukan dalam pembuatan suatu keputusan
- c. Merealisasikan keinginan publik dan menjaga dengan baik komunikasi antar lembaga.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai dan mengukur kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kerja suatu organisasi maupun pegawai dalam melaksanakan tugas agar lebih baik lagi dan sesuai dengan tujuan serta sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dan tujuan dari pengukuran kinerja

sendiri untuk menetapkan keputusan yang akan berdampak pada kemajuan kinerja yang lebih baik untuk kedepannya.

d. Indikator Kinerja

Menurut Sudarmayanti (2007:198), indikator kerja merupakan ukuran untuk menggambarkan sejauh mana tingkat dalam mencapai sasaran dan tujuan sesuai yang ditetapkan. Indikator kerja digunakan untuk melihat kegiatan kerja organisasi setiap harinya dalam melaksanakan tugas sesuai sasaran dan tujuan yang dilaksanakan dengan menunjukkan kemampuan suatu organisasi tersebut. Sedangkan menurut Wibowo (2010:128) indikator kinerja digunakan sebagai kegiatan untuk mengukur perilaku yang diamati secara kualitatif.

Menurut Pasolong (2010:178), adapun hal-hal dalam menentukan indikator kinerja yaitu : (1) detail dan jelas, (2) terukur secara deskriptif maupun secara perhitungan, (3) dapat memperlihatkan hasil pencapaian, manfaat dan akibat, (4) dapat mudah dalam menyesuaikan dan peka terhadap perubahan, dan (5) mengolah data dan menganalisis secara tepat dan kompeten. Sedangkan menurut Nasucha dalam Pasolong (2010:180), ada lima indikator kerja dalam bagian masyarakat, antara lain :

- a. Menunjukkan seberapa besar suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- b. Biaya yang digunakan lebih ekonomis.

- c. Memerlihatkan ketetapan dalam membandingkan hasil dengan output.
- d. Memiliki kemampuan untuk menunjukkan dalam membandingkan hasil yang telah dikeluarkan dan yang ingin dicapai.
- e. Adanya bukti dalam meningkatkan keadilan dari kebijakan yang telah dikeluarkan.

Namun menurut Bastian (2010:33) indikator kinerja merupakan ukuran yang melalui jumlah dan deskripsi lalu memberikan pemahaman dalam meningkatkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun indikator tersebut ialah :

- a. Indikator masukan, merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti barang dan jasa, sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan lainnya.
- b. Indikator keluaran, merupakan suatu harapan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan.
- c. Indikator hasil, merupakan efek langsung dari fungsi kegiatan pada jangka menengah.
- d. Indikator manfaat, merupakan hasil dari segala tujuan pelaksanaan suatu kegiatan.
- e. Indikator pengaruh, merupakan pengaruh yang terjadi pada setiap indikator yang telah ditetapkan.

Lain halnya menurut Dwiyanto (2006:50-51) ada beberapa faktor indikator kinerja yang dapat mengukur kinerja dari sebuah organisasi, yaitu :

- a. Produktivitas, konsep produktivitas diukur untuk menentukan tingkat ke efisiensi dan ke efektivitasan dalam melakukan pelayanan. Produktivitas juga digunakan untuk mengukur rasio antara pengeluaran dan pemasukan secara umumnya yang diharapkan menjadi indikator kinerja yang penting.
- b. Kualitas layanan, merupakan suatu indikator kerja dalam kepuasan masyarakat terhadap kinerja organisasi yang sering kali mendapat sorotan dari masyarakat. Informasi terhadap kepuasan masyarakat ini terkadang didapatkan melalui media massa maupun diskusi masyarakat. Karena kepuasan masyarakat berperan penting sebagai mengukur kinerja dari organisasi tersebut.
- c. Responsivitas, merupakan kemampuan organisasi untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Responsivitas dapat menjadi indikator kerja karena dapat menjelaskan tujuan dari organisasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- d. Responabilitas, merupakan alat untuk mendeskripsikan dalam pelaksanaan suatu kegiatan organisasi publik yang sesuai dengan ketentuan organisasi dalam mensejahterakan pelayanan kepada

- e. Akuntabilitas, merupakan konsep untuk menggambarkan kegiatan dan keputusan suatu organisasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, indikator kinerja merupakan suatu alat untuk mengukur sejauh mana kinerja organisasi publik dalam pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator ini juga berperan sebagai penilaian dari masyarakat terhadap kinerja suatu organisasi apakah sudah baik ataupun belum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang telah ditetapkan oleh keputusan suatu organisasi yang sesuai dengan sasaran maupun tujuan.

2. Pembangunan

Menurut Siagian (1998) pembangunan merupakan kegiatan dalam usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dikerjakan secara sadar untuk suatu bangsa, negara, dan pemerintah kearah modern dalam rangka membina bangsa. Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) bahwa pembangunan merupakan rangkaian perubahan menuju kearah yang lebih baik yang dikerjakan secara terencana. Namun menurut Tikson (2005) pembangunan merupakan perubahan dalam ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan secara sadar melalui keputusan dan formasi yang diharapkan.

Dalam buku yang ditulis oleh Inu Kencana (2006:96) yang berjudul Ilmu Administrasi Publik mendefinisikan bahwa pembangunan merupakan sebuah perbaikan yang dari suatu situasi nasional ke situasi nasional yang lain dalam rangka menuju ke perubahan yang jauh lebih baik lagi. Sedangkan Sunyoto Usman (2004:5) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kapasitas dari sektor Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam dalam tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan sebagai alasan untuk mengejar sebuah kesuksesan oleh public maupun suatu kelompok tertentu.

Pembangunan juga diartikan oleh Tjokromidjojo, Bintoro, dan Mustopadidaja (1980:58) merupakan suatu usaha untuk melakukan perubahan dari kondisi tertentu menjadi suatu kondisi yang jauh lebih baik dan yang diinginkan. Namun Adrian Leftwich (2000:17) mengemukakan jika pembangunan dikategorikan menjadi sembilan pendekatan pokok, yaitu pembangunan yang dilihat untuk kemajuan yang akan datang, pembangunan untuk pendayagunaan sumber daya alam, merencanakan pembangunan untuk memperkenalkan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, pembangunan untuk melihat keadaan tertentu, pembangunan untuk proses yang lebih baik lagi, pembangunan untuk meningkatkan skala di bidang ekonomi, pembangunan digunakan untuk perubahan yang tersusun, pembangunan sebagai arah dalam menuju modern, dan pembangunan sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan dalam produksi.

Namun dibalik pembangunan yang mengharapkan perubahan yang lebih baik dan yang sesuai tidak semata-mata langsung tercapai. Pasti ada saja halangan yang akan menghambat pembangunan tersebut terealisasikan. Sadono Sukimo (1976) menjabarkan hal-hal yang dapat menghambat suatu pembangunan itu, yakni :

- a. Pembangunan Nasional mampu dalam meningkatkan ekonomi suatu negara dan berbagai daerah, sehingga pembangunan didaerah tidak dikerjakan karena pembangunan didaerah tersebut sudah difasilitasi oleh pembangunan Nasional.
- b. Strategi dan rencana pembangunan daerah tidak ada bedanya dengan strategi dan rencana pembangunan nasional, jadi tidak perlu lagi ada teori dan analisa tentang permasalahan untuk pembangunan didaerah.
- c. Kurangnya tenaga ahli dalam merealisasikan pembangunan tersebut.

Tetapi pembangunan juga di jelaskan oleh Ridhiansyah Adi Permana (2010), bahwa pembangunan merupakan upaya untuk mencapai kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dilaksanakan secara berkelanjutan, sesuai dengan efektivitas suatu daerah, dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, serta melihat tantangan dalam perkembangan daerah, nasional, dan global.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dari kondisi tertentu menjadi kondisi yang lebih baik untuk lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari

sektor ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia menuju perubahan yang diinginkan secara berkelanjutan dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat.

3. Infrastruktur

a. Pengertian Infrastruktur

Pengertian infrastruktur menurut Grigg (1988) adalah proses fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sosial maupun ekonomi, seperti menyediakan transportasi, jalan, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Infrastruktur sebagai proses juga merupakan bagian seperti sarana prasarana yang saling berhubungan. Infrastruktur juga sangat berperan penting dalam proses sosial maupun ekonomi dikalangan masyarakat. Maka dari itu, infrastruktur dijadikan sebagai dasar dalam menentukan keputusan.

Namun menurut American Public works Association (Stone, 1974:12), infrastruktur dileaskan sebagai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh pelaku dalam pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah, tenaga listrik, dalam pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Sedangkan menurut Moteff (2003), infrastruktur tidak hanya mengurus dalam hal ekonomi maupun sosial, tetapi infrastruktur juga mengurus terhadap masalah pertahanan dan keberlanjutan

dalam pemerintah. Disini menjelaskan bahwa infrastruktur ini tidak hanya fokus terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti masalah sosial dan ekonomi. Tetapi dalam sudut pandang yang lain, infrastruktur juga fokus terhadap masalah pertahanan dan keberlanjutan dalam suatu pemerintahan.

Selanjutnya Vaughn and Polland (2003) juga berpendapat bahwa infrastruktur secara umum memiliki beberapa cakupan dalam pelayanan umum, meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, bangunan umum, dan lain lain yang bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat. J'afar M. (2007) mengemukakan infrastruktur memiliki fungsi positif terhadap perkembangan serta pertumbuhan ekonomi jangka pendek dalam menciptakan lapangan kerja konstruksi yang akan mendukung perusahaan disektor terkait.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur mendefinisikan infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Namun menurut Soerjo (2007), infrastruktur dipahami sebagai material fisik, seperti jalan, jaringan drainase, instalasi listrik dan jaringan air minum yang berhubungan dengan permasalahan infrastruktur sipil dan perkotaan. Tetapi infrastruktur juga berperan terhadap pembangunan dan prosuder operasi. Konteks ini dikenal sebagai istilah Hard Infrastruktur dan Soft Infrastruktur yang

mana kedua jenis ini saling berkaitan dalam menciptakan pelayanan infrastruktur secara penuh dan memiliki cakupan yang luas.

Infrastruktur juga terbagi menjadi tiga menurut The World Bank (1994), yaitu :

- a. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur nyata yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, seperti tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas, jalan, bendungan, kanal, irigasi, drainase, rel, pelabuhan, lapangan terbang, dan lain-lain.
- b. Infrastruktur sosial, infrastruktur untuk menunjang kegiatan pendidikan, kesehatan, perumahan, tempat rekreasi.
- c. Infrastruktur administrasi, infrastruktur dalam menunjang kegiatan penegakan hukum, kontrol administrasi, dan koordinasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan Infrastruktur merupakan kegiatan fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sosial maupun ekonomi, seperti menyediakan transportasi, jalan, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Infrastruktur ini tidak hanya fokus terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti masalah sosial dan ekonomi saja. Tetapi dalam sudut pandang yang lain, infrastruktur juga fokus terhadap masalah pertahanan dan keberlanjutan dalam suatu pemerintahan.

b. Jenis Infrastruktur

Menurut Kodoatie (2005), infrastruktur sebagai pendorong utama meningkatkan proses sosial dan proses ekonomi yang dilakukan dalam harkeselarasn secara menyeluruh. Infrastruktur yang merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kegunaan pemerintah dalam hal pelayanan harus bekerja secara sama-sama dan tidak dapat terpisah. Grigg (1988) menjelaskan infrastruktur memiliki 13 kategori, ialah :

- a. Sistem penyediaan air, seperti waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air.
- b. Untuk mengelola air limbah, seperti mengumpulkan, mengolah, pembuangan, dan daur ulang air limbah.
- c. Alat untuk mengola limbah padat.
- d. Alat untuk menanggulangi banjir, drainase, dan saluran irigasi.
- e. Alat mengalirkan air dan arah air.
- f. Pemenuhan kebutuhan transportasi, seperti rel, jalan, lapangan terbang, dan lain-lain yang berhubungan dengan transportasi.
- g. Sistem transit public.
- h. Untuk pemenuhan kebutuhan listrik, seperti produksi dan distribusi.
- i. Fasilitas dalam mengelola gas alam.
- i. Pemenuhan fasilitas public, seperti sekolah, rumah sakit, kantor

- l. Pengadaan rekreasi public, seperti taman kota, plaza, dan lain-lain.
- m. Pengadaan kebutuhan komunikasi.

Kemudian ada tujuh bagian besar infrastruktur menurut Grigg (1988), yaitu :

- a. Bagian jalan, seperti jalan, jalan raya, jembatan.
- b. Bagian pelayanan dalam transportasi, seperti jalan, rel, pelabuhan kapal, lapangan terbang.
- c. Bagian komunikasi.
- d. Bagian pengelolaan air, seperti air bersih, air kotor.
- e. Bagian mengatur limbah.
- f. Bagian dalam pembangunan dan olahraga luar,
- g. Bagian produksi dan distribusi energi, seperti listrik dan gas.

Namun menurut Kenastri (2007), infrastruktur Pekerjaan Umum di Indonesia dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. Infrastruktur Jalan
2. Infrastruktur Pengairan
3. Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Berdasarkan penjelasan di atas tentang infrastruktur yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam infrastruktur

F. Definisi Konsepsional

Definisi konseptual merupakan suatu abstraksi dari kerangka dasar teori oleh para ahli yang didefinisikan kembali dengan pendapat sendiri. Adapun definisi konseptual dalam permasalahan ini adalah:

1. Kinerja

Kinerja adalah hasil pencapaian kerja yang di dukung oleh sumber daya individu atau suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran kerja yang telah di tetapkan dengan menggunakan cara membandingkan hasil kerja yang telah di laksanakan oleh seorang pegawai.

2. Pembangunan

Pembangunan adalah usaha yang di lakukan secara sadar dari kondisi tertentu menjadi kondisi yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju perubahan yang di inginkan secara berkelanjutan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan kegiatan fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sosial, ekonomi, pertahanan dan keberlanjutan dalam suatu pemerintahan.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini, peneliti fokus untuk mengukur dari indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, yang

menurut Dwiyanto (2006:50-51) ada lima indikator kinerja untuk menentukan kinerja menjadi lebih baik, yaitu :

1. Kinerja

a. Produktivitas

- 1) Cara mencapai hasil yang telah ditetapkan.
- 2) Perbandingan antara rencana dan hasil pembangunan.

b. Kualitas Layanan

- 1) Pola perilaku pegawai dalam menanggapi dan memberikan pelayanan yang dikehendaki oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan yang tepat dan sesuai.

c. Responsivitas

- 1) Respon yang cepat dalam menanggapi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- 2) Memiliki daya kemampuan untuk memberikan solusi.

d. Responibilitas

- 1) Kegiatan serta program yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi.
- 2) Sesuai dengan prosedur kegiatan.

e. Akuntabilitas

- 1) Tanggung jawab untuk mengevaluasi kegiatan.
- 2) Transparansi dalam melaksanakan kegiatan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam karya tulis ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Disini peneliti ingin mencoba untuk menjelaskan, menggambarkan, dan memberikan pandangan secara jelas tentang permasalahan yang ingin diteliti, yaitu Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pembangunan Infasrtuktur Derah Tahun 2016.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber atau informan bersangkutan terlibat dalam proses melaksanakan program tersebut yang memiliki data secara jelas dan lengkap. Data primer dapat berupa opini subjek atau kelompok dan hasil dari kegiatan observasi lapangan terhadap suatu kejadian atau kegiatan. Data primer ini diperoleh berdasarkan data dari wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis secara tidak langsung. Semisalnya dari dokumen, arsip, atau literatur terdahulu yang di publikasikan atau tidak di publikasikan yang berkaitan dengan

identifikasi masalah yang akan diteliti. Data sekunder yang di kumpulkan peneliti dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen.

3. Lokasi Penelitian / Unit Analisa

Lokasi penelitian ini akan fokus pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama dan jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju ke Kecamatan Kotawaringin Lama.

4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memenuhi serta melengkapi data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menjelaskan dan menggambarkan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun teknik yang akan digunakan penulis, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab mendalam secara tatap muka yang akan dilakukan penulis terhadap informan atau narasumber untuk menanyakan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam memenuhi data yang dibutuhkan peneliti, maka sasaran dalam wawancara ini adalah Kepala Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Kecamatan Kotawaringin Lama dan informan yang memiliki informasi data lengkap yang dibutuhkan oleh penulis. Wawancara ini dilakukan sampai peneliti mendapatkan seluruh data yang dicari, apabila data sudah terpenuhi, maka wawancara akan diakhiri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Dokumentasi yang diperlukan berupa, dokumen-dokumen, surat-menyurat, Peraturan Daerah, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga akan mencari data lewat dokumen-dokumen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dan Lakip Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

c. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti dalam mencari data dengan mengamati keadaan yang sebenarnya terjadi

terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengamati keadaan jalan yang belum selesai tersebut, dan ingin mengamati kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menangani pembangunan infrastruktur jalan yang ingin diteliti oleh peneliti.

5. Teknis Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Kegiatan yang dilakukan menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2001:246-249), yaitu :

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses untuk memilih hal-hal yang dianggap pokok, yang dianggap penting, untuk mempermudah penulis melakukan penjelasan dan gambaran yang didapat dilapangan serta dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. Tidak hanya itu, reduksi juga dapat membantu penulis dalam memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga dapat membantu menjawab pertanyaan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar mudah memahami apa yang terjadi selama dilapangan, dan dapat

merencanakan kembali rencana kerja selanjutnya dengan berdasarkan yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses pengumpulan data, mencari masalah-masalah yang terjadi saat dilapangan, menyusun data-data yang telah didapat selama dilapangan, kemudian apabila dirasa data dilapangan sudah lengkap, penulis akan menyimpulkan hasil data selama penelitian dilapangan, menjadi kesimpulan yang valid.

6. Rencana Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini, peneliti akan mencoba menjelaskan pembahasan ini secara jelas dan tersusun. Dimana pembahasanan ini akan di bagi menjadi 4 bab, dan masing-masing bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka dasar teori, definisi konsepsional, definisi Operasional, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

BAB II : DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Menjelaskan secara ringkas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

Karubahan Kontaminyon Bawat

benihan yang akan dibudidayakan. Untuk Proses Perkecambahan (Masa
 Menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum jenas

BAB II : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

kecambah sistematis benihan

definisi konseptual, definisi Operasional, metode penelitian, dan
 manfaat dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian, kerangka dasar teori,
 Menjelaskan tentang jenis objek yang dibahas, meliputi masalah

BAB I : PENDAHULUAN

yang pap. yaitu :

Ditanya berapakah nilai uji t pada uji dua arah? dan apakah
 akan munculnya perbedaan berapakah nilai secara jenas dan terdapat
 Untuk menjelaskan data yang berkaitan dengan ini, berikut

e. Kecambah Sistematis Benihan

jenis benihan yang akan diuji, yaitu kesuburan yang akan
 dibudidayakan pada jenas, benih akan diuji apakah hasil data
 yang didapat jenis yang akan diuji, kerangka dasar teori yang
 meliputi yang akan diuji, yaitu jenas yang akan diuji dan jenas yang
 Proses penelitian data, muncul masalah

c. Benih dan Kesuburan

berapakah yang akan diuji,
 berapakah kerangka keajaiban yang akan diuji

BAB III : PEMBAHASAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAERAH TAHUN 2016

Menjabarkan hasil yang telah didapat dari keseluruhan rangkaian penelitian tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembangunan infrastruktur daerah tahun 2016, dan kemudian hasil dari penelitian tersebut dijelaskan secara terperinci

BAB IV : PENUTUP

Menjabarkan hasil penelitian yang telah didapat dengan pandangan penulis, serta memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut.